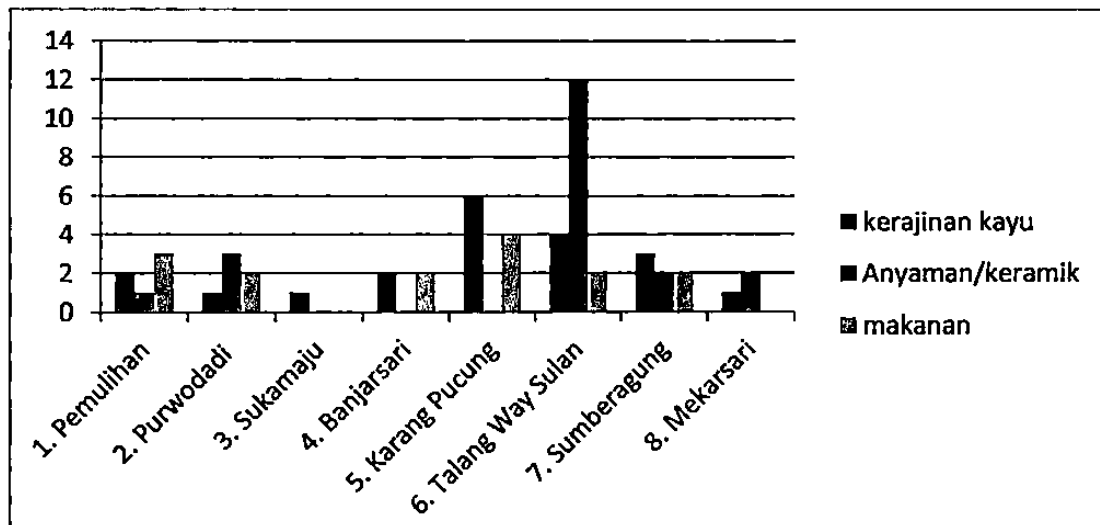


## BAB I

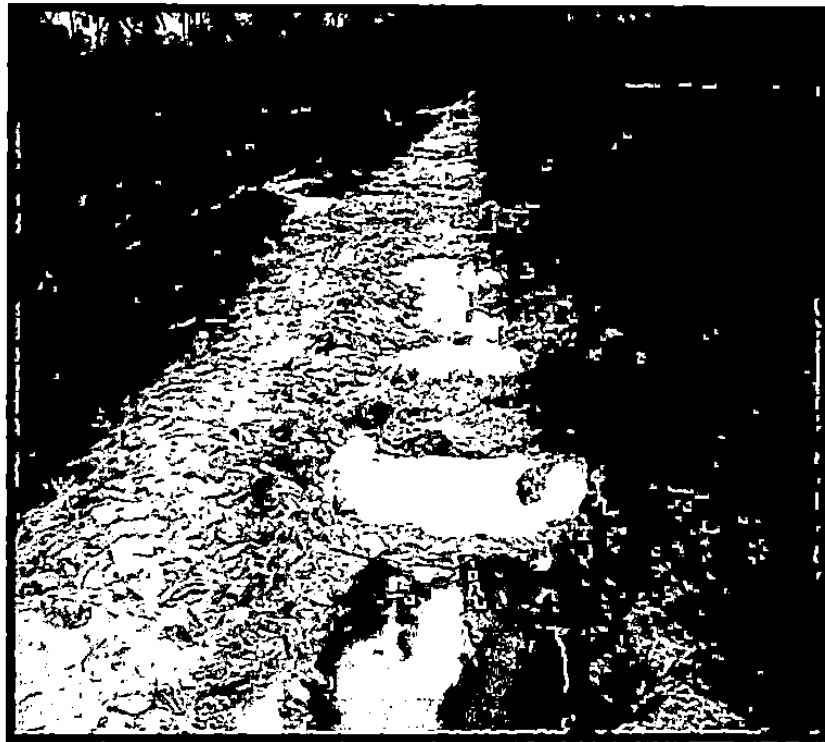
### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Home industri merupakan elemen kecil dalam perekonomian suatu wilayah namun memiliki peranan penting dalam menunjang ekonomi masyarakat. Home industri perlu diperhatikan oleh pemerintah karena sedikit membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran yang ada. Kemunculan home industri jelas membantu para pengangguran terutama di sekitar wilayah home industri. Namun seringkali keberadaan home industri ini kurang mendapat respon dari pemerintah untuk proses kelancaran usaha. Misalnya dukungan infrastruktur jalan yang rusak parah mampu menghambat pemasaran home Industri.

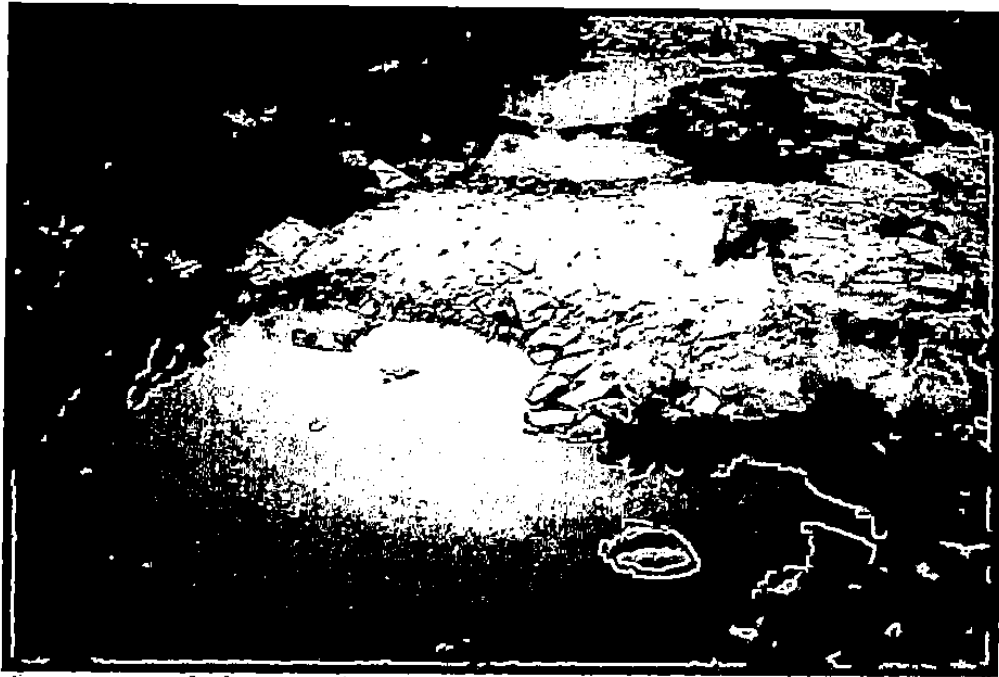


Home industri Kecamatan Way Sulan tentu jumlahnya sangat banyak, melihat dari grafik di atas bahwasannya sudah banyak home industri di Kecamatan Way Sulan seperti industri kerajinan kayu, industri kerajinan anyaman/keramik dan industri kerajinan makanan. Namun beberapa tahun terakhir melihat kondisi jalan di Kecamatan Way Sulan sangat memprihatinkan. Tingginya jalan rusak sangat mengganggu proses pemasaran hasil home industri. Bahkan data statisti menyebutkan bahwasannya Kecamatan Way Sulan memiliki 22,9 Km jalan beraspal, 32,9 Km jalan berbatu dan 28,1 Km jalan tanah.



Gambar 1.1

Kondisi Jalan rusak di Kecamatan Way Sulan



Gambar 1.2

### Kondisi Jalan rusak di Kecamatan Way Sulan

Dari gambar diatas bahwa melihat kondisi jalan-jalan di Kecamatan Way Sulan sangat memprihatinkan untuk dilalui kendaraan. Seperti misalnya kendaraan pribadi sangat sulit dan harus berhati-hati melewati kondisi jalan seperti itu. Kemudian pemasaran hasil home industri sering mengalami keterlambatan distribusi karena waktu tempuh yang lama karena terhambat situasi jalan diKecamatan Way Sulan. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

Termasuk juga bagi Dinas Pekerjaan Umum harus memanfaatkan sumber daya terutama sumber daya manusia dengan melihat hasil (*output*) melalui kinerja. Lampung merupakan salah satu provinsi besar di pulau Sumatera. Lampung juga sebagai gerbang perekonomian semua

Provinsi di Sumatera karena terdapat Pelabuhan yang menghubungkan pulau Sumatera dan Jawa. Lampung memiliki banyak aset kekayaan seperti halnya sektor pariwisata. Kondisi geografis yang sangat strategis dari Provinsi Lampung yang letaknya dekat dengan pantai membuat Lampung kaya juga dengan potensi wisata pantai, Dam, Taman Nasional, serta Situs Purbakala.

Data dari BPS Provinsi Lampung Lampung Selatan saat ini dengan semangat melakukan perubahan sedang giat-giatnya membangun infrastruktur jalan. Untuk meningkatkan perekonomian pada suatu wilayah diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang cukup berperan adalah infrastruktur jalan. Dengan kondisi jalan yang baik maka kegiatan ekonomi akan meningkat. Pada tahun 2012, panjang jalan Negara yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan yaitu sepanjang 159,95 Km.

*(Sumber : Data BPS Provinsi Lampung)*

Sementara jalan Provinsi sepanjang 157,51 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.240,44 Km. Dari jalan yang ada tersebut 43,31 persen dalam kondisi baik namun persentase jalan dengan kondisi rusak berat juga juga cukup besar yaitu 51,09 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jalan yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan semakin panjang terutama jalan kabupaten. Namun semakin banyak jalan yang dibangun, kondisi jalan juga semakin banyak yang rusak. Hal ini disebabkan semakin ramainya lalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan.

*(Sumber : Data BPS Provinsi Lampung)*

Namun berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur saat ini. Banyak sekali Jalan rusak di kabupaten Lampung Selatan yang tidak dibenahi atau diperhatikan oleh pemerintah. Lalu kemajuan pembangunan yang masih lamban tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Ini terjadi terutama di daerah-daerah sentra industri di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Sulan. Sebagai daerah Home Industri Kecamatan Way Sulan sudah sepiantasnya mendapat dukungan infrastruktur jalan yang baik. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*).

Jalan adalah akses untuk menuju ke sesuatu tempat. Jalan merupakan salah satu faktor apakah suatu tempat akan maju ataukah malah terisolir. Jalan yang bagus akan membuat suatu tempat akan cepat maju, sedangkan sebaliknya jalan yang buruk/rusak akan membuat suatu tempat akan menjadi terisolasi/ terpencil. Hal inilah yang terjadi di jalan raya menuju ke Kecamatan Way Sulan. Jalan tersebut merupakan jalan utama pergi atau ke Way Sulan. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

Berita dari koran Lampost tanggal 15 April 2013 Selain Waysulan, Jalan raya Talangjawa—Tanjungan di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, sudah lama longsor. Namun, karena tidak kunjung diperbaiki jalan yang menghubungkan empat Kecamatan itu kini longsohnya melebar. Berdasarkan pengamatan, longsor di jalanan di tanjakan misterius, Desa Neglasari, Katibung, telah mencapai 1/3 badan jalan. Menurut warga, semula longsor hanya bagian tepi jalan saja. Namun, sudah

berlangsung lama dan tidak diperbaiki sehingga lebarnya bertambah hingga mencapai sepertiga dari lebar jalan.

Padahal, jalan ini cukup ramai dilintasi oleh semua jenis kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, dan roda delapan. Prasarana perhubungan darat ini menghubungkan empat Kecamatan dari dua kabupaten, yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Merbaumataram, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar aspal hotmix pada permukaan jalan ini sudah mengelupas berganti tanah atau kerikil. Pada sisi lain jalan ini ramai dilintasi oleh truk yang mengangkut batu andesit dari salah satu pabrik bahan galian tersebut yang ada di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung. ([www.Lampost.co](http://www.Lampost.co))

Sebenarnya rusaknya jalan tersebut terjadi sudah lama tetapi belum juga ada perbaikan. Walaupun ada perbaikan tetapi hanya diberi batu-batu pada kubangannya. Ketika musim kemarau (panas) kondisinya seperti di gurun pasir yang banyak debu berterbangan sedangkan pada musim hujan kondisinya seperti lumpur di lahan sawah yang siap ditanami dan seperti kubangan kerbau. Jalan tersebut banyak berlubang dengan diameter kubangan mencapai 1 meter dan kedalaman mencapai kira 30 cm. Sudah pasti hal ini merugikan semua pihak. Diperparah lagi banyak mobil-mobil truk besar bermuatan sering bolak-balik meintasi jalan tersebut. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

Jalan-jalan di Way Sulan sebenarnya tidak lagi sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Bertambahnya volume kendaraan baik kendaraan roda 2, roda 4, maupun kendaraan dengan roda lebih dari 4 tetapi tidak diimbangi dengan adanya perbaikan maupun pelebaran jalan.

Akibat rusaknya jalan terjadi hal-hal seperti berikut :

1. Sering terjadi kecelakaan akibat menghindari kubangan air.
2. Dapat menyebabkan sakit pernapasan, karena banyak debu-debu berterbangan.
3. Rawan akan tindak kejahatan.
4. Pemborosan waktu, yang seharusnya waktu tempuh dari Way Sulan sampai Bandar Lampung ataupun sebaliknya hanya sekitar 2 jam, kini menjadi lebih lama.
5. Way Sulan menjadi daerah terisolir, karena orang menjadi malas akan datang ke Way Sulan karena kondisi jalan yang rusak.

(Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

Sebenarnya warga Way Sulan sangat berharap kepada instansi terkait agar jalan akses utama tersebut diperbaiki secepatnya karena lama kelamaan jika tidak diperbaiki daerah Way Sulan akan terisolir. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

Sebagai contoh Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan merupakan Desa Lintas ekonomi yang menghubungkan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kecamatan Wayay Karya Lampung

Timur. Hal ini menjadikan dua daerah untuk mengadakan kerja sama dalam upaya peningkatan Perbaikan ekonomi dengan tidak menutup peluang bagi Kecamatan sekitarnya, mengingat Kecamatan Way Sulan , dan Waway Karya secara umum merupakan daerah sub urban dan Desa Banjarsari khususnya merupakan daerah pedesaan dengan potensi produksi yang cukup dan luas di bidang pertanian dan peternakan. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)



Gambar 1.3

#### Kondisi jalan rusak di Kecamatan Wy Sulan

Namun ironisnya, selama ini kerugian konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa dibebankan kepada produsen dalam hal ini masyarakat desa Banjarsari. Sehingga tidaklah mengherankan bila masyarakat Desa Banjarsari dalam menjual hasil bumi dan peternakan selalu dibawah standar harga umum produsen , kecuali bila masyarakat



di produksinya tersebut, tidak kepada konsumen atau melalui tengkulak yang mengambil sendiri produksi mereka yang membebankan biaya angkut kepada produsen (Petani atau peternak) . Hal tersebut tidak akan terjadi bila kondisi umum jalan Desa Banjarsari dalam kondisi baik dan memenuhi standar sebagai sarana transportasi yang layak pakai, sehingga tidak akan mungkin konsumen ataupun tengkulak enggan membeli hasil bumi dan peternakan Masyarakat Desa Banjarsari. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*).



Gambar 1.4

Kondisi jalan rusak di Kecamatan Wy Sulan

Jalan Kecamatan sepanjang 15 km rusak berat di Kecamatan Way Sulan. Ini terjadi karena banyaknya keluar masuk kendaraan-kendaraan besar Industri atau perusahaan yang melintasi jalan ini dan tanpa adanya

perbaikan jalan. Belakangan ini kondisi jalan di Way Sulan ini makin lama makin rusak parah kondisinya. Daerah ini perlu perhatian khusus dari pemerintah terutama dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan, agar perekonomian warga sekitar juga dapat berlangsung lancar. (Sumber: *Observasi Lapangan Peneliti*)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kinerja dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan dalam mendukung home industri di Kecamatan Way Sulan Lampung Selatan tahun 2012-2013?
2. Bagaimana kendala atau faktor penghambat dalam perbaikan jalan di Kecamatan Way Sulan?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- 1.1 Untuk mengetahui kinerja dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan dalam pemerataan perbaikan jalan di Lampung Selatan khususnya Kecamatan Way Sulan.
- 1.2 Untuk mengetahui faktor penghambat perbaikan jalan di

## 2. Manfaat Penelitian

- 2.1 Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca.
- 2.2 Untuk dapat dijadikan sumber kajian ilmu pengetahuan yang ada dalam penelitian.
- 2.3 Penelitian ini diharapkan memberi input yang berguna untuk Dinas Pekerjaan Umum Lam-Sel agar lebih merata dalam perbaikan jalan di seluruh wilayah Lampung Selatan.

## D. Kerangka Dasar Teori

### 1. Kinerja

Penilaian kinerja pada pemerintah sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas, efisiensi pelayanan, motivasi para birokrat pelaksana, memonitor pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan lebih terarah dan sistematis. Penilaian kinerja birokrasi publik tidak hanya dilakukan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektifitas,

tetapi harus juga dilihat dari indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan, akuntabilitas dan responsif.

#### **A. Konsep kinerja**

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance*. Mahsum mendefinisikan kinerja adalah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. (Mahsum, 2006 :25).

Menurut Lexie M. Giroth (2004 :100) menjelaskan bahwa kinerja adalah fungsi dari kemampuan (*ability*), motivasi(*motivation*) dan peluang (*opportunity*). Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika. (Cardoso , 1997 :135).

Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari hasil pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. (Wibowo, 2013: 2-3). Jadi kinerja dapat diartikan seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau juga apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola, untuk memperbaiki kinerja perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. (Wibowo, 2013: 229)

Menurut Robertson pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa.

2. Kualitas barang dan jasa

3. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan .
4. Dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sementara menurut Lohman(2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Menurut Whittaker menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsum, 2006 : 26). Jadi pada intinya pengukuran kinerja merupakan kegiatan atau aktifitas penilaian terhadap target dan sasaran yang telah ditentukan.

Elemen pokok pengukuran kinerja antara lain:

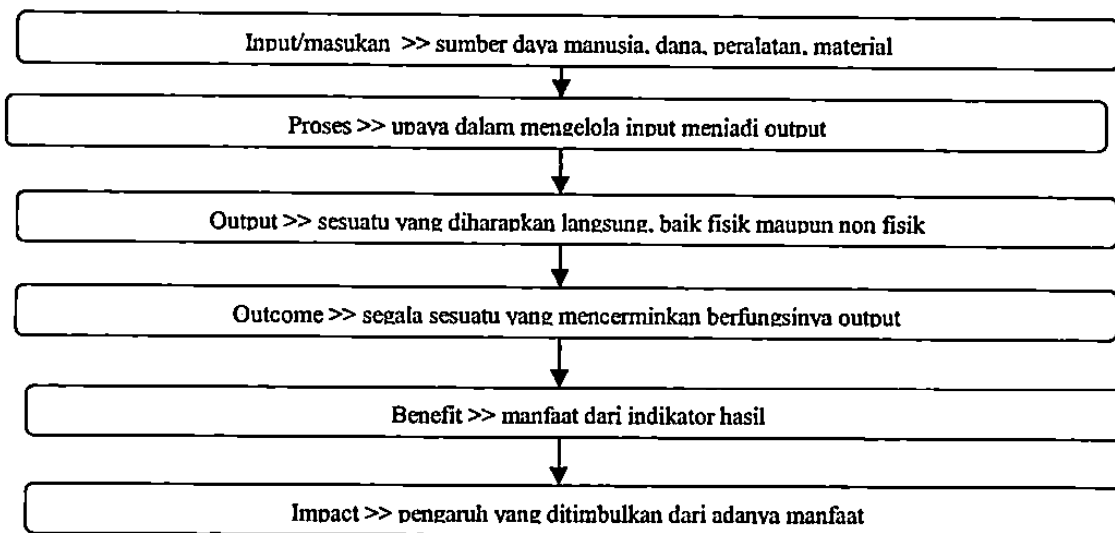
1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisai.
4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Jadi keempat hal diatas merupakan elemen-elemen pokok yang ada

### **C. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dapat berupa anggaran, SDM, peralatan atau teknologi, dan material yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.
4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jagka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang



### Bagan Aspek Pengukuran Kinerja

Sedangkan menurut BPKP cakupan pengukuran kinerja harus mencakup:

1. Kebijakan (policy): untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan.
2. Perencanaan dan penganggaran(planning dan budgeting): untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
3. Kualitas (quality): untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi.
4. Kehematan (economy) : untuk mer-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya.
5. Keadilan (Equity): untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat



6. Pertanggungjawaban (accountability) : untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.  
(Mahsum, 2006 : 33).

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja, namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik yaitu :

1. *Pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai*, pernyataan tentang maksud mendefinisikan bagaimana organisasi diatur untuk melakukan sesuatu sehingga lebih bersifat outcome-oriented atau berorientasi pada manfaat dari pada sekedar mission statement atau pernyataan tentang misi. Sedangkan sistem nilai mendefinisikan tentang perilaku yang diharapkan dalam mencapai maksud tujuan tersebut.
2. *Manajemen strategis*, manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dapat berakibat dalam formulasi dan implementasi dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis

mengandung pokok pikiran dalam garis besar tentang apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai.

3. *Manajemen sumber daya manusia*, guess menyarankan praktik kinerja tinggi manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui: harmonisasi kriteria dan persyaratan bagi semua staff, menggunakan tes psikologi dalam seleksi staff, sistem formal dalam mengomunikasikan nilai-nilai terhadap staff.
4. *Pengembangan organisasi*, pengembangan organisasi berkepentingan dengan perencanaan dan implementasi program yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas yang dengan pengembangan tersebut organisasi berfungsi dan mengelola perubahan.
5. *Konteks organisasi*, dalam hubungannya dengan organisasi, kinerja atau proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja suatu organisasi dipengaruhi secara langsung oleh rencana dan tindakan manajerial, struktur organisasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Sementara itu, rencana dan tindakan manajerial serta struktur organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal sebelum memberikan pengaruh pada kinerja organisasi.
6. *Desain kerja*, desain kerja merupakan spesifikasi dari isi, metode dan hubungan pekerjaan dengan maksud untuk

memuaskan pernyataan teknologis dan organisasional seperti halnya persyaratan sosial dan pribadi pemegang kerja.

7. *Fungsionalisasi*, bagaimana suatu organisasi berfungsi merupakan faktor kontekstual yang secara langsung mempengaruhi proses desain dan operasi manajemen kinerja.
8. *Budaya*, budaya merupakan perekat yang mempersatukan organisasi dengan manajemen kinerja. Filosofi dan desain tidak terelakkan dipengaruhi oleh budaya organisasi yang berlaku. Komponen budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma-norma dan gaya manajemen.
9. *Kerja sama*, dalam suatu organisasi berbasis tim, pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja tim yang terdiri dari sekelompok orang dengan latar belakang budaya berbeda dan kompetensinya bervariasi. Keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuannya bekerja sama. (Wibowo, 2013: 81).

#### **E. Klasifikasi Ukuran Kinerja**

Sebenarnya banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran kinerja harus relevan, signifikan, dan komprehensif.

Diaantaranya:

1. Produktivitas, biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu,

produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output.

2. Kualitas, pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal maupun ukuran eksternal seperti kepuasan masyarakat.
3. Ketepatan waktu, pada dasarnya ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang telah dikatakan akan dilakukan.
4. Cycle time, menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ke titik lain dalam proses.
5. Pemanfaatan sumber daya, merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumberdaya tersedia untuk digunakan.
6. Biaya, ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per unit.

Selain itu menurut amstrong, mengklasifikasikan ukuran kinerja dalam empat tipe ukuran, yaitu :

1. *Ukuran uang*, dipergunakan untuk mengukur memaksimalkan income, meminimalkan pengeluaran dan meningkatkan tingkat pendapatan.

2. *Ukuran waktu*, mengekspresikan kinerja dengan jadwal waktu kerja, jumlah jaminan simpanan dan kecepatan aktifitas.
3. *Ukuran pengaruh*, termasuk pencapaian standar, perubahan dalam perilaku (kolega, staf, atau pelanggan), pelengkap fisik kerja dan tingkatan penerimaan pelayanan.
4. *Reaksi*, menunjukkan bagaimana orang lain menilai pekerja dan oleh karenanya kurang objektif. Reaksi dapat diukur dengan penilaian oleh rekan kerja, pelanggan atau analisis terhadap keluhan. (Wibowo, 2013: 235)

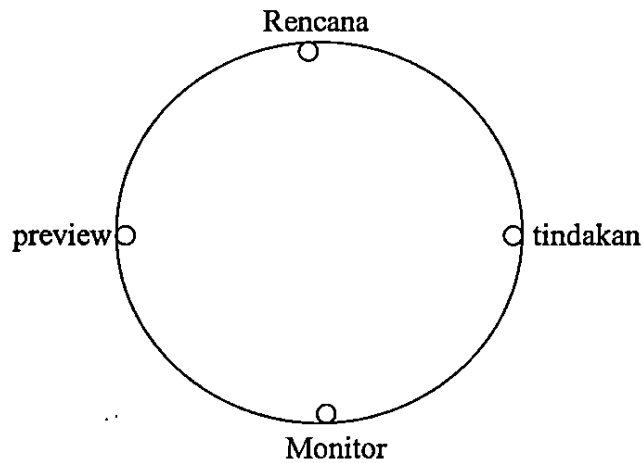
Beragamnya ukuran kinerja menunjukkan adanya peluang fleksibilitas dalam penggunaannya, yang dapat dipilih sesuai dengan jenis usaha masing-masing organisasi . pada dasarnya setiap unit kerja dapat menentukan ukuran yang relevan dan signifikan bagi organisasinya.

## **F. Model Manajemen Kinerja**

### **1. Model Deming**

Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan dan akhirnya melakukan review atau penilaian

kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. (Wibowo, 2013: 25).

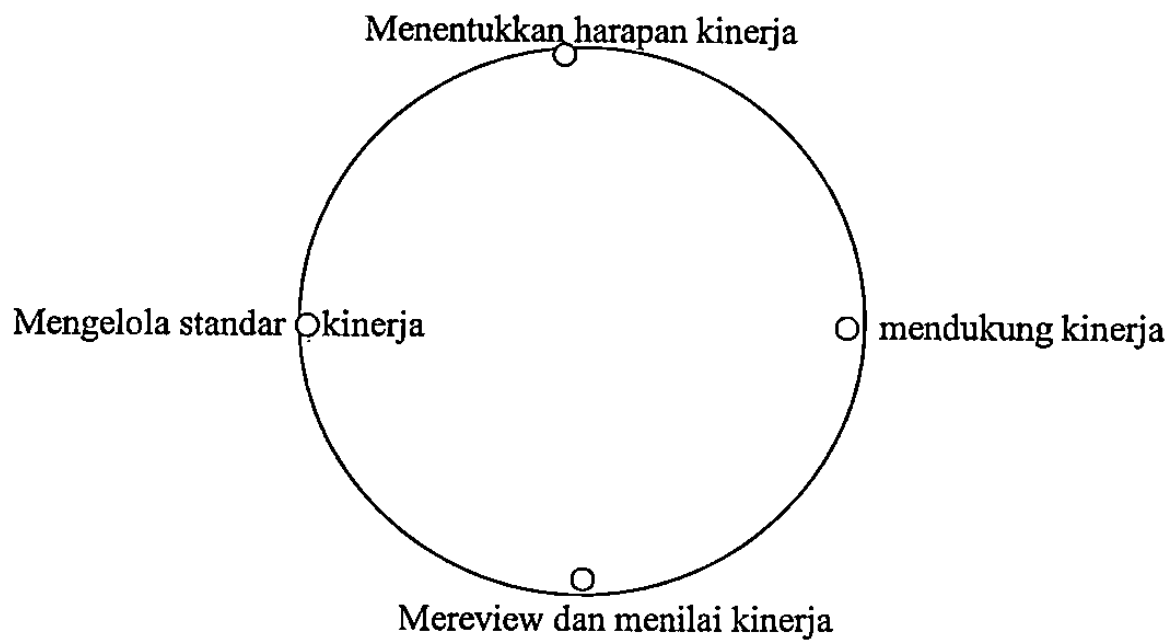


Model Deming

## 2. Model Torrington dan Hall

Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja. Kemudian, ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan.

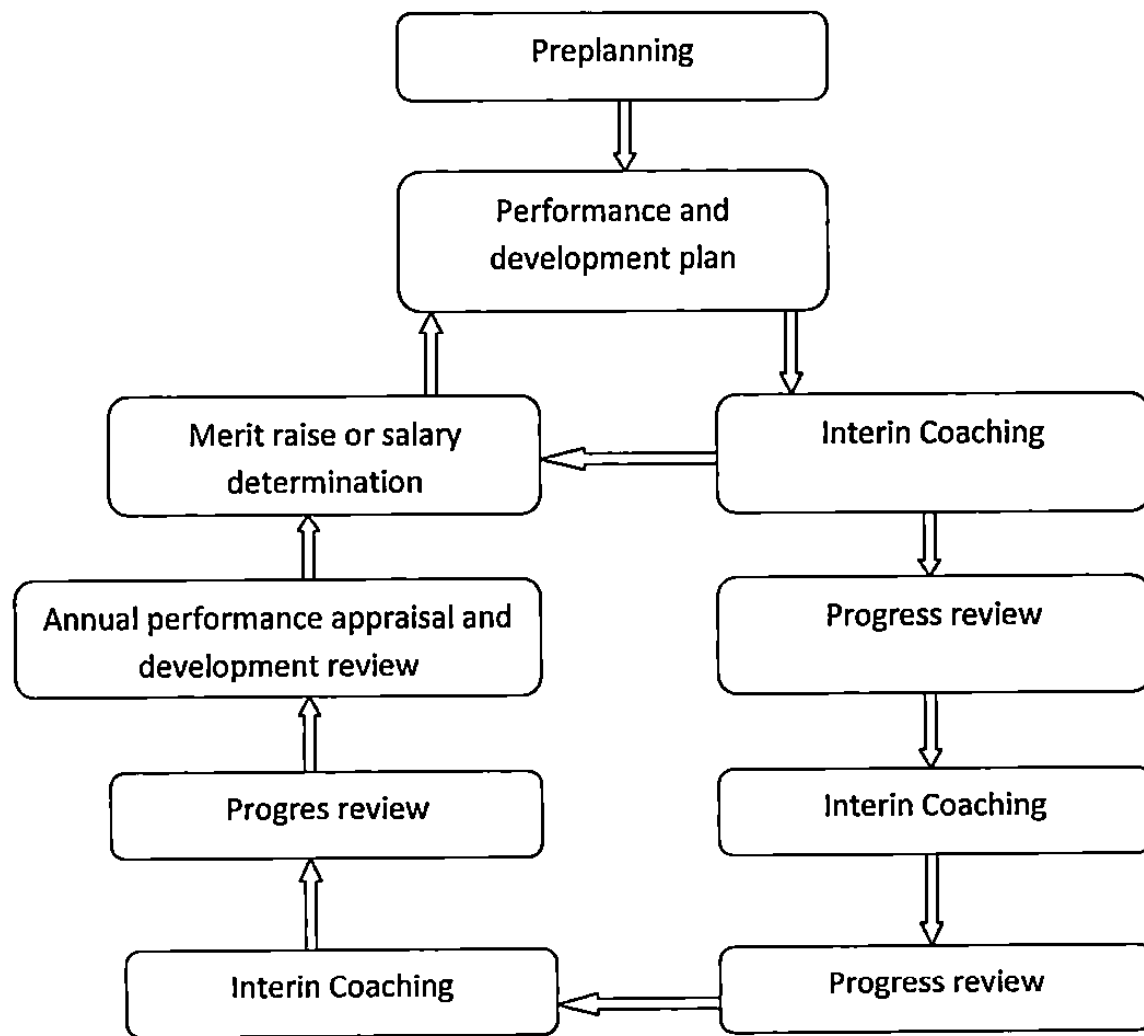
Sementara itu, pelaksanaan kinerja berlangsung dilakukan peninjauan kembali dan penilaian terhadap kinerja. Langkah selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja. standar kinerja juga harus dijaga agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. (Wibowo, 2013: 26)



Model Torrington dan Hall

### 3. Model Costello

Proses manajemen kinerja dikemukakan oleh Costello dalam bentuk siklus. Siklus dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga dapat dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana kerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, diberikan coaching pada sumber daya manusia dan dilakukan pengukuran kemajuan kinerja. Peninjauan kembali selalu dilakukan terhadap kemajuan pekerjaan dan apabila diperlukan dilakukan perubahan rencana. Coaching dan Review dilakukan secara berkala dan pada akhir tahun dilakukan penilaian kinerja tahunan dan diteruskan untuk memulai kembali pengembangan

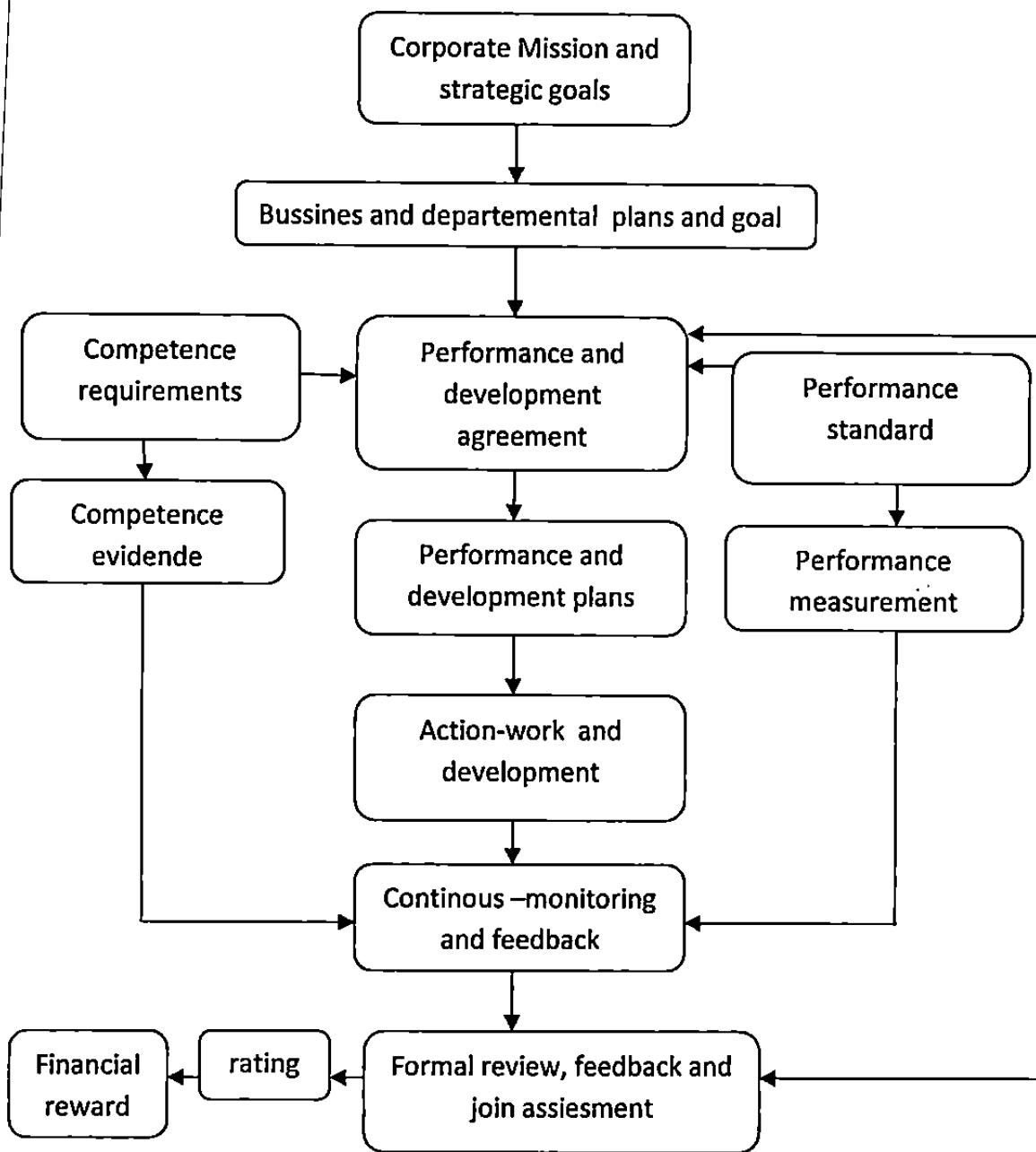


Model Costello

#### 4. Model Armstrong dan Baron

Armstrong dan baron mengemukakan siklus manajemen kinerja sebagai sekuen atau urutan. Proses manajemen kinerja dilihat merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan secara beruntun agar dapat mencapai





Model Armstrong dan Baron

### G. Indikator Kinerja

Menurut BPKP indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lohman, indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara

kuantitatif afektifitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target target dan tujuan organisasi. Penentuan indikator kinerja :

1. *Biaya pelayanan*, indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit, misalnya biaya per unit pelayanan.
2. *Penggunaan*, indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik.
3. *Kualitas dan standar pelayanan*, merupakan indikator yang paling sulit, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif.
4. *Cakupan pelayanan*, indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
5. *Kepuasan*, indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjarangan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan

## **2. Pekerjaan Umum**

### **A. Pekerjaan Umum dan Bagiannya**

Pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, yang penjabarannya bermakna sangat luas. Beberapa faktor yang dapat menunjang tercapainya kesejahteraan umum tersebut, antara lain pertumbuhan ekonomi tinggi yang memerlukan tersedianya infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang handal, sehingga dapat menunjang proses produksi dan distribusi, serta berbagai proses kegiatan ekonomi lainnya.

Penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, selain menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan, meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta dukungan bagi peningkatan daya saing sektor riil khususnya proses produksi dan distribusi, juga memberi kontribusi kesejahteraan secara langsung bagi masyarakat berupa pemenuhan pelayanan dasar.

Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang handal, dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antara; Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

([www.pu.go.id/publik/ind](http://www.pu.go.id/publik/ind))

Berdasarkan peraturan pemerintah no 14 th 1987 Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia

Kemudian Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Berdasarkan Rencana Strategis 2010 – 2014 Direktorat Jenderal Bina Marga, Infrastruktur jalan di Indonesia mempunyai peran yang vital dalam transportasi nasional dengan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada. Apabila infrastruktur jalan terus menerus dikembangkan agar semakin handal, maka jalan akan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi sehingga

... dalam perekonomian nasional

dan juga peningkatan daya saing ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional.

Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Secara ekonomi makro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur jalan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta, sedangkan secara ekonomi mikro, infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Dijelaskan Dalam Rencana Strategis 2010 – 2014 Direktorat Jenderal Bina Marga, Infrastruktur jalan juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah harus dapat memberikan pelayanan transportasi secara efisien (lancar), aman (selamat) dan nyaman. Di samping itu jaringan jalan juga harus dapat memfasilitasi peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga secara ekonomi produk-produk yang dikembangkan menjadi lebih kompetitif.

Rencana Strategis 2010 – 2014 menyatakan Direktorat Jenderal Bina Marga menjelaskan Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang sangat penting

yaitu: aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada, karena jaringan jalan merupakan bagian dari interaksi tata ruang dan sistem transportasi keberadaan jalan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang ada di sekitarnya.

Peran infrastruktur jalan dalam menggerakkan roda perekonomian sangat penting, dimana ketersediaan infrastruktur jalan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi terutama berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,5%, sehingga dari sini harus diantisipasi kebutuhan tersebut baik dengan menyediakan penambahan kapasitas fisik maupun melalui bentuk pengaturan dan pengendalian kebutuhan transportasi atau Transport Demand Management (TDM).

#### **B. Dukungan infrastruktur jalan bagi home industri**

Peran infrastruktur di samping sebagai penunjang dan prasarana pembangunan, juga untuk memperkuat perekonomian. Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar juga dikenal dengan bentuk home-industry, merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini home industri berbentuk koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan

kerja baru dan penumbuh daya-saing. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Home industri atau juga bisa disebut usaha kecil, menurut UU no 9 th 1995 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertavkepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kemudian ciri ciri atau kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dan UMKM dapat meningkatkan terus daya-saingnya terutama bila didukung dengan infrastruktur jalan.

Infrastruktur jalan menjadi salah satu syarat utama perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Adanya infrastruktur jalan juga akan membuka pengelolaan usaha, mengembangkan peran koperasi dan UMKM dalam proses industrialisasi, dan mengintegrasikan pengembangan usaha di tingkat regional. Selanjutnya Pengembangan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-saing.

Keberhasilan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap usaha home industry memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi infrastruktur jalan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan di lingkungan home industri.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, telah ditekankan bahwa kewenangan jalan ada pada pemerintah pusat dan juga



daerah. Dinas PU bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Bina Marga yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi, dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang bina marga;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, meliputi program pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang bina marga, meliputi program pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan

## **E. Definisi Konseptual**

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, Adalah hasil akhir (output) organisasi yang menangani Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga yang sesuai dengan tujuan organisasi, yang dapat dipertanggung-jawabkan, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna

jasa organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Dukungan infrastruktur jalan terhadap Home Industri adalah program dan kegiatan Bina Marga yang mendukung Home Industri sesuai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kinerja Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga menurut Deming:**

- a. Input dari pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan
- b. Output dan outcome realisasi target program dan kegiatan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan
- c. Manfaat dan dampak dari target program dan kegiatan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan

### **2. Dukungan infrastruktur jalan terhadap Home industri;**

- a. Pembangunan jalan menuju dan sekitar lokasi home industri
- b. Pemeliharaan jalan menuju dan sekitar lokasi home industri

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengenai jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejala yang meninterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya. (Lexy, 2002: 3). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian. Kemudian metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok atau masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Hadari, 2001: 6)

### **2. Sumber Data**

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari interview dengan pihak-pihak yang

Tabel 1.1 Data Primer

No	Data	Sumber
1	Program dan kegiatan Bina Marga Dinas PU	Dinas Pekerjaan Umum
2	Kesesuaian Anggaran	Dinas Pekerjaan Umum
3	Input,output,Process	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pemasaran Hasil Home Industri	Pengusaha Home Industri
5	Manfaat dan Dampak dari Program Dinas	Pengusaha Home Industri

b. Data Sekunder

Pemakaian data sekunder dalam penelitian merupakan keperluan utama, karena penelitian ini berkaitan dengan data sekunder yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 1.2 Data sekunder

Data	Sumber
1. Program Dan Kegiatan	Renstra Dinas Pekerjaan Umum
2. Akuntabilitas Kinerja	Lakip Dinas Pekerjaan Umum
3. Informasi Home Industri	Undang-undang
4. Informasi Pekerjaan Umum	Peraturan Pemerintah
5. Informasi PU Bina Marga	Renstra Direktorat Bina Marga

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

#### a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau arsip-arsip atau catatan, foto, tabel maupun peta, tempat dijadikan penelitian, dimana dengan dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian.

(Kuntjoroningrat, 1998: 228)

#### b. Wawancara

Yaitu usaha mengumpulkan data berupa informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.

(Hadari, 2007: 118). Yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Lampung Selatan, dan pengusaha Home Industri di Kecamatan Way Sulan.

#### c. Observasi

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara melihat serta meninjau kondisi langsung yang ada di lapangan. Peneliti melakukan peninjauan langsung kondisi Kecamatan Way Sulan terkait dengan

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data secara kualitatif, yaitu pengolahan data dalam bentuk uraian atau penggambaran fenomena yang sedang diteliti untuk menggambarkan dari hasil observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dengan berbagai cara (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan kemudian akan diproses sebelum siap disajikan, analisis kualitatif menggunakan rangkaian kata yang disusun kedalam teks melalui penjabaran kata dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis (Silalahi, 2000: 220)